

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM & HAM
D.I. YOGYAKARTA**

**RENCANA
KERJA (RENJA)
T.A. 2022**



DAFTAR ISI

Gambaran Umum2

Maksud dan Tujuan3

Ruang Lingkup4

Dasar Hukum4

Kegiatan yang Dilaksanakan5

Hasil yang Dicapai.....6

Kesimpulan.....16

Gambaran Umum

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. Sebagai penjabaran dari RPJM, RKP memuat rencana dan prioritas pembangunan yang dibajarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Renja K/L tahun 2022 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan sebagai wujud penjabaran tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMN dan Renstra 2020-2024 yang dituangkan kedalam dokumen Renja. Renja merupakan suatu upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara sistematis dan responsive terhadap kondisi dan situasi.

Sejak awal penyusunan Renja K/L 2022 pada Triwulan pertama tahun 2021, Indonesia dan seluruh bangsa di dunia masih diwarnai oleh bencana nasional yaitu Covid-19. Tak sedikit dampak yang timbul akibat bencana ini, antara lain terganggunya perekonomian dan keuangan negara, meningkatnya angka pengangguran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengendalikan kondisi tersebut pemerintah memperbaharui sistem perencanaan pembangunan di tahun 2022 yang tertuang dalam Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan restrukturisasi program dari 12 program menjadi 4 program berdasarkan isu atau area. Hasil dari RSPP akan dijabarkan kembali kedalam dokumen Renja K/L yang tertuang pada aplikasi KRISNA tahun 2022, untuk selanjutnya menjadi dasar dan pedoman penyusunan Renja Kantor Wilayah.

Maksud & Tujuan

A. MAKSUD

Penyusunan Renja T.A. 2022 ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mensinkronkan dokumen perencanaan dan penganggaran khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dengan target dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Unit Pusat. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya anggaran Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta yang fokus dan tepat sasaran dan fleksibel, serta penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan informasi pada dokumen anggaran, akuntabel dan transparan.

B. TUJUAN

Tujuan tersusunnya Renja Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta agar perencanaan penganggaran sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai alat bantu untuk melakukan pengecekan dan validasi terhadap data dan informasi perencanaan penganggaran satuan kerja Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis, dan sebagai referensi untuk melakukan penyusunan RKA-K/L tahun selanjutnya, serta untuk penilaian kinerja oleh para Stake Holders.

Ruang Lingkup & Dasar Hukum

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan Rencana Kerja T.A. 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah penyusunan dalam aplikasi Krisna dalam perspektif Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP).

DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L;
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM;
- 8) Surat Bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas nomor B-517/M.PPN/D.8/PP. 04.03/05/2020 dan Direktur Jenderal Anggaran nomor S-122/MK.2/2020 tanggal 24 Juni 2020 hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan Penyusunan Renja pada aplikasi KRISNA Tahun 2022 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta diinisiasi mulai Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan menyampaikan arahan persiapan penyusunan Pagu Indikatif T.A. 2022 yang selanjutnya dituangkan ke dalam Analisa Kebutuhan Anggaran T.A. 2022.

Analisa Kebutuhan Anggaran Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta disusun oleh setiap Bagian/Bidang dari seluruh Divisi sesuai dengan masing-masing Program yang diemban. Selanjutnya hasil penyusunan Analisa Kebutuhan Anggaran diinput ke dalam aplikasi Krisna menjadi Rencana Kerja (Renja) yang memuat Sasaran Program hingga anggaran setiap satuan kerja berdasarkan Lokasi. Selain itu di dalam aplikasi Krisna juga memuat Sasaran, Arah Kebijakan dan Program dan Kegiatan Prioritas tahun 2022.

Pada tahapan penyusunan Renja, dimulai setelah penetapan rancangan awal RKP dan Surat Bersama (SB) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tentang Pagu Indikatif TA 2022. Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan kemudian menyusun Pagu Indikatif per Program untuk didistribusikan ke seluruh satuan kerja. Penyusunan Renja juga berpedoman pada kerangka pendanaan Rencana Strategis untuk dilakukan pemutakhiran data dan informasi.

Kantor Wilayah c.q. Divisi Administrasi bertanggungjawab penuh atas Renja yang telah disusun serta memastikan Renja yang telah disusun oleh masing-masing Divisi benar dan valid.

Hasil yang Dicapai

RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR WILAYAH D.I. YOGYAKARTA T.A. 2022 (DIVISI ADMINISTRASI)

NO.	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	
			RENSTRA	RKA-K/L
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien			
	Nilai Reformasi Birokrasi	85		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	90		
	Nilai Maturitas SPIP	3		
	Opini Atas Laporan Keuangan	WTP		
	Indeks Persepsi Integritas	67		
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI			
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	93%		
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93%		
	Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM	6%		
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	67		
1558. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM				
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien		24.200.308	21.687.394
	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1		

RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR WILAYAH D.I. YOGYAKARTA T.A. 2022
(DIVISI PEMASYARAKATAN)

NO.	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	
			RENSTRA	RKA-K/L
SS4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional			
	Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri, berdaya guna	0,45		
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitas nilainya	0,7		
	Persentase menurunnya residivis	0,01		
	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan	0,8		
SP2B2	Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan			
	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	53		
	Indeks pemenuhan hak narapidana	90		
	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan	50		
	Indeks pembinaan khusus anak	68		
	Indeks pengelolaan basan baran	70		
	Indeks pelayanan tahanan	70		
5252 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah				
SK 13	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah		1.241.726	1.241.726
	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	81		

RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR WILAYAH D.I. YOGYAKARTA T.A. 2022
(DIVISI KEIMIGRASIAN)

NO.	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	
			RENSTRA	RKA-K/L
SS3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20		
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian			
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20		
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian			
	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12		
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah				
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah		1.136.904	1.335.009
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20		
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12		
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12		

RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR WILAYAH D.I. YOGYAKARTA T.A. 2022
(DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM)

NO.	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	
			RENSTRA	RKA-K/L
SS3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20		
SP2A1	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum			
	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	86%		
5251 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah				
SK 10	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum		1.572.070	1.104.829
	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%		
SK 11	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD		705.930	1.008.171
	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84%		
SS3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik			

NO.	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	
			RENSTRA	RKA-K/L
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,20		
SP2D	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia			
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32		
	Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	99%		
	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual	15%		
	Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)	7%		
	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI	100%		
5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah				
SK 8	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM		1.008.933	1.193.339
	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	631 Layanan		
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus		
SK 9	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal		245.967	173.832
	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%		
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 Lokus		

NO.	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	
			RENSTRA	RKA-K/L
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	3 Laporan		
SS 1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan			
	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan	3,15		
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI			
	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%		
	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang		
	Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%		
5250 - Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah				
SK 8a	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah		207.900	245.408
	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%		
SK 8b	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan		44.100	44.592
	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang		
SS 2	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM			

NO.	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	
			RENSTRA	RKA-K/L
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	70%		
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	40%		
SP4	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM			
	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%		
	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%		
	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%		
5255 - Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah				
SK 10	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		125.766	206.695
	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Ins Pem		
	jumlah kab/kota peduli HAM	3		
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1		
SK 11	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		100.580	22.700
	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3		

NO.	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	
			RENSTRA	RKA-K/L
SS 1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan			
	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan	3,15		
SP3B1	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum			
	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%		
	Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%		
5256 - Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah				
SK 6	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah		114.848	156.957
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan		
SS 6	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat			
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61 Indeks		
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%		
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%		

NO.	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	
			RENSTRA	RKA-K/L
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%		
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 Indeks		
SP3B2	Terwujudnya kesadaran dan Pemahaman hukum			
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,6%		
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%		
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%		
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,6%		
4841 – Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah				
SK 7	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah		2.725.010	2.682.674
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%		
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%		
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	77%		
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%		

NO.	SASARAN / INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	
			RENSTRA	RKA-K/L
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%		
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien			
	Persentase KTI yang disitasi	20%		
SP1C	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset.			
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%		
	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal.	20%		
5248 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah				
SK 8	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		231.785	260.893
	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%		
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku		

Kesimpulan

Renja Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta T.A. 2022 yang tertuang dalam aplikasi Krisna diharapkan responsif khususnya dalam ranah penganggaran dalam rangka pemulihan pasca pandemi Covid-19 dan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, Renja merupakan momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan program dan pencapaian target pembangunan pada periode tahun sebelumnya serta diharapkan dapat memberikan rekomendasi penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Secara khusus penyusunan Renja K/L 2021, dilakukan penguatan restrukturisasi program dengan melibatkan seluruh unsur administratif dan fasilitatif Unit Eselon I di lingkungan Kantor Wilayah dari awal hingga akhir penyusunan. Oleh karena itu, dokumen Renja K/L ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan acuan baik oleh Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta maupun pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Sebagai saran, Kantor Wilayah c.q. Divisi Administrasi Bagian Program dan Humas segera melakukan evaluasi Renja tahun 2022 pada tahun berjalan, untuk mensinkronkan kembali indikator dan target yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi tersebut kiranya dapat dijadikan dasar perbaikan dalam penyusunan Renja tahun yang akan datang.

Dibuat di Yogyakarta,

Pada tanggal 1 Februari 2022

Kepala Bagian Program dan Humas



F. Surya Kumara

NIP 196712101987021001